

6-30-2015

PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI DI LAPORAN KEUANGAN

Stalsa Frani Akmyga
Universitas Indonesia, stalsa.frani@hotmail.com

Aria Farah Mita
Universitas Indonesia, aria.farahmita@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki>

Recommended Citation

Akmyga, Stalsa Frani and Mita, Aria Farah (2015) "PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI DI LAPORAN KEUANGAN," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 12: Iss. 1, Article 2.

DOI: 10.21002/jaki.2015.02

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol12/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 12 Nomor 1, Juni 2015

PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI DI LAPORAN KEUANGAN

Stalsa Frani Akmyga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
stalsa.frani@hotmail.com

Aria Farah Mita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
aria.farahmita@gmail.com

Abstract

Corporate governance has impacts on the disclosure of key management compensation in the financial statements through the application of the principle of transparency. This research aims to analyze the impact of corporate governance structure, such as family ownership, managerial ownership and the effectiveness of the audit committee, as well as audit quality of key management compensation disclosures in the financial statements according to PSAK No. 7 (Revised 2010). The research using multiple regressions examined non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011. The research found that companies that are controlled by family and not part of a business group significantly affect management to comply with the mandatory disclosure related to key management compensation information in the financial statements. The research also found that the effectiveness of the audit committee significantly affects management to provide better information related to financial disclosures. Furthermore, the audit quality significantly increases the transparency of the compensation of key management related to PSAK No. 7 (Revised 2010).

Keywords: corporate governance, disclosures, family ownership, audit committee, related party transaction

Abstrak

Teori *corporate governance* dapat memengaruhi pengungkapan kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan melalui penerapan prinsip transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak struktur *corporate governance*, yakni kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, dan efektivitas komite audit, serta kualitas audit terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010). Penelitian ini menggunakan regresi multivariabel pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dan bukan bagian dari kelompok usaha secara signifikan memengaruhi manajemen untuk mematuhi aturan pengungkapan wajib terkait dengan informasi kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas komite audit secara signifikan memengaruhi manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih baik terkait pengungkapan keuangan. Begitu pula dengan kualitas audit yang signifikan meningkatkan transparansi atas kompensasi manajemen kunci terkait PSAK No. 7 (Revisi 2010).

Kata kunci: tata kelola, pengungkapan laporan keuangan, kepemilikan keluarga, komite audit, transaksi pihak berelasi

PENDAHULUAN

PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” mengatur pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan sendiri entitas induk. Salah satu pengungkapan yang diwajibkan adalah pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci. Pembayaran ini bersifat penting karena merepresentasikan performa perusahaan dan kualitas manajerial (Conyon dan He 2011).

Pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci sebagai salah satu transaksi pihak berelasi memiliki potensi timbulnya *moral hazard* pada manajemen sehingga dapat mengakibatkan konflik keagenan. Konflik keagenan memungkinkan manajemen sebagai pihak yang memahami bisnis perusahaan untuk menjadi oportunistik sehingga memberikan informasi untuk kepentingan pribadinya dan tidak memberikan informasi yang luas kepada pemegang saham (Bhattacharya dan Spiegel 1991). Selain itu, konflik keagenan juga dapat timbul antara pemegang saham pengendali dengan non-pengendali (minoritas). Anderson dan Reeb (2003) menyebutkan bahwa pemegang saham pengendali dapat menempatkan anggota keluarganya di dalam manajemen perusahaan tersebut. Kondisi ini dapat mengakibatkan perbedaan luasnya informasi dan pemahaman bisnis antara pemegang saham pengendali dengan non-pengendali karena pemegang saham pengendali memiliki akses langsung kepada perusahaan.

Salah satu informasi yang dapat dimiliki lebih banyak oleh manajemen ataupun pemegang saham pengendali adalah pengungkapan pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci di laporan keuangan. Luasnya pengungkapan ini dipengaruhi oleh efektivitas *corporate governance* (CG) dan kualitas audit perusahaan (Basset et al. 2007). Mekanisme pengawasan dalam CG diharapkan dapat mendukung luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan

keuangan sebagaimana yang diatur pada PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai penyusun dan pengembang pedoman CG di Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dan menyebutkan asas-asas pelaksanaan CG yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam perusahaan. Asas transparansi mengatur bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dengan CG yang baik diharapkan dapat memberikan informasi dengan transparan kepada para pemegang saham. Selain itu, pengawasan yang baik di perusahaan sebagai salah satu mekanisme CG dapat mengurangi konflik keagenan dan menimbulkan *interest alignment* antara manajemen, pemegang saham pengendali, dan non-pengendali.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa atribut CG internal memengaruhi kualitas pengungkapan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat menimbulkan *interest alignment* antara pemegang saham dan pihak manajerial. Penelitian oleh Al-Akra dan Hutchinson (2012) dan Ali et al. (2007) menemukan adanya pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan wajib di laporan keuangan. Namun, penelitian Claessens et al. (1999) menemukan bahwa perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dan merupakan bagian dari kelompok usaha¹ dapat mengakibatkan ekspropriasi yang merugikan pemegang saham minoritas, dimana pemilik perusahaan mengambil keuntungan dari pihak minoritas dengan mengalihkan dana yang telah dihimpun kepada perusahaan lain dalam kelompok usaha yang sama.

Riset Farahmita (2012) sudah mencoba meneliti pengaruh keberadaan kepemilikan

¹ Kelompok usaha (*business group*) adalah sekelompok perusahaan terafiliasi yang dikontrol oleh pemegang saham yang sama.

manajerial terhadap luasnya pengungkapan manajemen kunci. Namun demikian, riset tersebut belum mempertimbangkan bahwa kepemilikan manajerial di perusahaan Indonesia sebenarnya merepresentasikan kepemilikan pemegang saham pengendali. Hal ini sesuai dengan Claessens et al. (2000) bahwa perusahaan di negara-negara Asia sebagian besar merupakan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi yang sebagian besar dikendalikan oleh keluarga, yang biasanya menempatkan wakil keluarga sebagai direktur atau komisaris.

Selain itu, terdapat faktor CG internal lain seperti pada riset Utama (2004), yang menemukan bahwa komite audit yang dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi terkait pengungkapan keuangan perusahaan dengan lebih baik.

Selain faktor CG internal, penelitian terdahulu juga menemukan bahwa CG eksternal seperti kualitas audit juga memengaruhi luas pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan, informasi yang diungkapkannya di laporan keuangan juga akan semakin luas (Basset et al. 2007). Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan ukuran KAP. Penelitian Bassett et al. (2007) dan Nelson dan Percy (2004) menemukan bahwa kualitas audit yang disajikan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP besar memberikan informasi keuangan yang bersifat wajib dengan lebih luas.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh struktur CG internal dan kualitas audit terhadap luasnya pengungkapan kompensasi yang diterima manajemen kunci dengan studi kasus penerapan PSAK No. 7 (Revisi 2010) yang baru mulai diimplentasikan pada 1 Januari 2011. Peneliti menemukan bahwa studi pengaruh CG berdasarkan PSAK No. 7 masih terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Farahmita (2012) yang meneliti pengaruh struktur CG, yaitu struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan

manajerial, keberadaan komite remunerasi dan nominasi, dan kualitas audit terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Penelitian ini memperbaiki pengukuran kepemilikan keluarga dalam Farahmita (2012). Riset Farahmita (2012) belum mempertimbangkan apakah perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga merupakan bagian dari kelompok usaha. Riset ini juga mengganti variabel keberadaan komite remunerasi dan nominasi dengan variabel efektivitas komite audit. Efektivitas komite audit dipandang sebagai salah satu variabel yang diduga memengaruhi tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi di laporan keuangan. Berbeda dengan Farahmita (2012), riset ini mengeluarkan variabel keberadaan komite remunerasi dan nominasi karena dipandang tidak terkait dengan tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi di laporan keuangan. Keberadaan mekanisme pengawasan dari komite remunerasi dan nominasi lebih berfokus kepada keputusan tingkat kompensasi dan nominasi manajemen kunci, bukan kepada transparansi dalam laporan keuangan.

Seperti dinyatakan dalam Farahmita (2012), riset terdahulu sebagian besar berfokus pada pengaruh mekanisme CG terhadap luasnya tingkat pengungkapan secara umum, baik di laporan tahunan maupun di laporan keuangan (Gao dan Kling 2012; Darus et al. 2009; Ho dan Wong 2001; Hermalin dan Weisbach 2012). Hanya sedikit riset yang berfokus pada pengaruh CG terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi di laporan keuangan, diantaranya yaitu Lo dan Wong (2011), dan Darus et al. (2009). Terlebih lagi, riset mengenai pengungkapan kompensasi manajemen kunci sebagai salah satu informasi transaksi pihak berelasi, sepanjang pengetahuan penulis, masih sangat terbatas. Selain Farahmita (2012), riset mengenai pengungkapan kompensasi manajemen kunci, baik di luar Indonesia, maupun yang sesuai dengan konteks struktur CG di Indonesia, sejauh pengetahuan penulis belum ditemukan. Dengan demikian, riset ini berusaha mengisi

research gap tersebut, yaitu dengan meneliti peran struktur CG dalam meningkatkan transparansi melalui luasnya pengungkapan tentang kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan perusahaan di Indonesia.

Selain berkontribusi dalam menambah literatur mengenai pengungkapan transaksi pihak berelasi di Indonesia, penelitian ini juga berkontribusi pada perkembangan penelitian mengenai dampak revisi PSAK sehubungan dengan konvergensi IFRS yang sedang berlangsung di Indonesia dan sebagai umpan balik penerapan PSAK No. 7 (Revisi 2010) terkait dengan kompensasi manajemen kunci yang baru saja berlaku efektif sejak 1 Januari 2011.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

PSAK No. 7 (Revisi 2010)

Pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010) adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, salah satunya adalah orang yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010) adalah pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci.

PSAK No. 7 (Revisi 2010) mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Kompensasi manajemen kunci diungkapkan secara total dengan rincian sub jumlah per kategori imbalan kerja, yakni (a) imbalan kerja jangka pendek, seperti gaji dan tunjangan; (b) imbalan pasca kerja; (c) imbalan kerja jangka panjang lainnya; (d) pesangon pemutusan kontrak kerja; dan (e) pembayaran berbasis saham. Mekanisme CG diharapkan dapat meningkatkan luasnya pengungkapan informasi di laporan keuangan, terutama pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Teori Keagenan dan Corporate Governance

Teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing pihak, yakni pemegang saham dan agen (dalam hal ini manajemen), memiliki motivasi untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri di mana motivasi pemegang saham adalah untuk terus meningkatkan profitabilitas perusahaan, sedangkan agen termotivasi untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya melalui investasi, pinjaman, dan kontrak kompensasi. Namun, pemegang saham belum tentu dapat menjamin bahwa agen tidak akan mengambil keuntungan yang dapat merugikan pemegang saham. Pada kondisi ini, muncullah konflik keagenan antara pemegang saham dan agen.

Pemegang saham dan agen akan berusaha untuk menghindari dampak dari konflik keagenan dengan mengeluarkan sejumlah biaya yang disebut biaya keagenan. Apabila agen dan pemegang saham dapat bekerja sama dan tidak melakukan kecurangan, maka biaya keagenan dapat diminimalisasi.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai penyusun dan pengembang pedoman CG di Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dan menyebutkan asas-asas pelaksanaan CG yang baik yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam perusahaan. Asas transparansi mengatur bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham, kreditor, dan *stakeholders* lainnya. Perusahaan dengan CG yang baik diharapkan dapat memberikan informasi dengan transparan kepada para pemegang saham. Selain itu, OECD (2004) juga menyebutkan adanya mekanisme pengawasan yang baik di dalam perusahaan sebagai salah satu mekanisme di dalam CG. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan dan menimbulkan *interest alignment* antara manajemen, *pemegang saham pengendali*, dan non-pengendali.

Mekanisme CG yang dapat memengaruhi luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan antara lain struktur kepemilikan perusahaan, efektivitas komite

audit, dan kualitas audit. Penelitian Wang (2006) menyatakan bahwa keluarga sebagai pemegang saham pengendali akan lebih mematuhi peraturan karena mereka berkeinginan untuk mempertahankan perusahaannya untuk dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Al-Akra dan Hutchinson (2012) dan Ali et al. (2007) yang menemukan adanya pengaruh positif keberadaan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham pengendali terhadap pengungkapan wajib di laporan keuangan. Namun, keberadaan keluarga sebagai pemegang saham pengendali dan merupakan bagian dari kelompok usaha dapat menimbulkan risiko ekspropriasi yang dapat merugikan pemegang saham lainnya (Claessens et al. 1999).

Keberadaan kepemilikan manajerial menurut Jensen dan Meckling (1976) dapat menimbulkan *interest alignment* antara manajer dan pemegang saham sehingga manajemen diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan pemegang saham berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun di Indonesia, kondisinya sedikit berbeda. Seperti sebagian besar negara di Asia, kendali perusahaan dimiliki oleh keluarga dan sebagian besar menempatkan anggota keluarganya di jajaran manajemen serta memiliki kepemilikan saham. Dengan demikian, kepemilikan manajerial ini juga merepresentasikan kepemilikan keluarga yang memiliki pengaruh yang konsisten dengan pengaruh kendali keluarga. Penelitian Farahmita (2012) menemukan bahwa kepemilikan manajerial mendorong luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Selain itu, efektivitas komite audit sebagai salah satu mekanisme CG juga dapat memengaruhi luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Zhang et al. (2007) menemukan bahwa perusahaan dengan komite audit yang tidak berjalan efektif dapat mengakibatkan lemahnya praktik *internal control* perusahaan sehingga memungkinkan manajemen untuk tidak memberikan informasi yang transparan kepada pemegang saham. Penelitian Utama

(2004) menyebutkan bahwa komite audit yang dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi terkait pengungkapan keuangan perusahaan dengan lebih baik. Salah satunya yaitu pengungkapan kompensasi manajemen kunci.

Selain faktor internal, faktor eksternal perusahaan juga dapat memengaruhi luasnya pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan, yakni kualitas audit. Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan, informasi yang diungkapkannya di laporan keuangan juga akan semakin luas (Basset et al. 2007). Kualitas audit dapat diukur salah satunya dengan ukuran KAP. Penelitian oleh Bassett et al. (2007) dan Nelson dan Percy (2004) menemukan bahwa kualitas audit yang disajikan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP besar memberikan informasi keuangan yang bersifat wajib dengan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP lainnya.

Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan Keluarga

Claessens et al. (1999) menyebutkan bahwa perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dapat mengakibatkan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Menurut Faccio et al. (2001), ekspropriasi dapat lebih mudah dilakukan pada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga yang berada dalam grup perusahaan terafiliasi karena dikendalikan oleh pemegang saham yang sama. Claessens et al. (2000) menemukan bahwa sebagian besar perusahaan di Asia, termasuk Indonesia, dikendalikan oleh keluarga dalam grup perusahaan terafiliasi berbentuk struktur piramida atau *cross holding*. Ekspropriasi akan semakin meningkat melalui struktur piramida dan *cross holding* karena struktur tersebut memberi peluang semakin besarnya informasi asimetri.

Namun demikian, terdapat penelitian lainnya dari Wang (2006), Ali et al. (2007), dan Al-Akra dan Hutchinson (2012) yang menemukan bahwa kontrol keluarga berpengaruh positif. Argumennya adalah karena

keluarga dianggap lebih memiliki kepentingan jangka panjang untuk berinvestasi. Hal tersebut demi menjaga reputasi dan keberlangsungan perusahaan untuk menjamin kesejahteraan keturunannya di masa depan.

Berdasarkan hasil riset Faccio et al. (2001), argumen Wang (2006), Ali et al. (2007), dan Al-Akra dan Hutchinson (2012), maka dapat diduga bahwa kepemilikan keluarga yang akan memberikan pengaruh positif dalam mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali adalah kepemilikan keluarga pada satu perusahaan yang tidak berada dalam grup perusahaan terafiliasi. Kepemilikan keluarga yang tidak berada dalam grup perusahaan terafiliasi dipandang akan lebih fokus, berhati-hati, dan memiliki kepentingan jangka panjang dalam berinvestasi karena tidak banyak ruang untuk melakukan ekspropriasi melalui transaksi antar afiliasi. Oleh karena itu, riset ini menduga bahwa kendali keluarga yang berada pada satu perusahaan yang tidak terafiliasi dalam grup akan berpengaruh positif terhadap luasnya pengungkapan transaksi berelasi di laporan keuangan, yang salah satunya adalah pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Oleh karena itu, hipotesis pertama adalah:

H₁: Perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tidak berada dalam grup perusahaan terafiliasi (non-grup) memiliki pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang lebih luas di laporan keuangan dibanding perusahaan lainnya

Kepemilikan Manajerial

Manajemen perusahaan di sebagian besar perusahaan di Asia berasal dari pemegang saham pengendali, yang dalam hal ini sebagian besar adalah keluarga (Claessens et al. 1999). Pemegang saham pengendali keluarga akan menunjuk wakil keluarga untuk duduk dalam jajaran manajemen. Misalnya, pihak keluarga akan menunjuk anaknya untuk menjadi direktur. Riset Morck dan Yeung (2003) menunjukkan bahwa kepemilikan saham manajerial yang berasal dari pemegang saham pengendali keluarga akan bertindak sesuai

dengan kepentingan keluarga. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial pada perusahaan keluarga non-grup merupakan bagian dari kendali keluarga dan diduga akan memiliki pengaruh yang konsisten dengan kepemilikan keluarga non-grup. Konsisten dengan hipotesis sebelumnya, kepemilikan manajerial perusahaan non-grup akan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan, yaitu melalui pengungkapan wajib terkait kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua adalah:

H₂: Perusahaan non-grup dengan keberadaan kepemilikan manajerial memiliki pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang lebih luas di laporan keuangan dibanding perusahaan lainnya

Efektivitas Komite Audit

Komite Audit berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 merupakan komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan bertugas untuk melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan termasuk informasi di laporan keuangan, ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. Sejalan dengan peraturan tersebut, penelitian Zhang et al. (2007) menyebutkan bahwa komite audit yang bertugas dengan efektif dapat mendorong *internal control* perusahaan menjadi lebih baik. Praktik *internal control* yang baik diharapkan dapat mendorong kepatuhan perusahaan untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku, salah satunya melalui pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga adalah:

H₃: Efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Kualitas Audit

Penelitian Basset et al. (2007) menyebutkan bahwa semakin baik kualitas

audit suatu perusahaan, maka informasi keuangan yang diungkapkan juga akan semakin luas. Pengukuran kualitas audit ditentukan melalui ukuran KAP yang mengaudit perusahaan tersebut. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar (KAP *Big 4*) diharapkan dapat mengungkapkan informasi keuangan dengan lebih luas karena KAP *Big 4* memiliki insentif untuk melindungi reputasi KAP-nya sehingga dapat lebih transparan dan mendorong luasnya pengungkapan di laporan keuangan (Bassett et al. 2007; DeAngelo 1981; Nielson dan Percy 2004; Wang dan Chen 2004). Penelitian Farahmita (2012) mendukung pendapat tersebut di mana Farahmita (2012) menemukan pengaruh positif kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat adalah:

H₄: Perusahaan dengan kualitas audit yang baik akan memiliki pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang lebih luas di laporan keuangan dibanding lainnya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada penelitian *hypothesis testing* dengan menggunakan *causal study* di mana peneliti hendak menggambarkan faktor yang memengaruhi terjadinya perbedaan luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010). Peneliti menggunakan unit analisis individu, yakni perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Oleh karena itu, peneliti melakukan regresi dengan *cross sectional* data.

Sasaran dan Target Penelitian

Untuk menguji hipotesis yang disebutkan di atas, peneliti memilih perusahaan yang akan diteliti berdasarkan kriteria:

a. Perusahaan yang diteliti tidak bergerak di bidang jasa perbankan, sekuritas, asuransi,

atau lembaga keuangan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan pengaruh regulasi industri tertentu yang dapat memengaruhi variabel penelitian.

- b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dengan tujuan meningkatkan komparabilitas atau daya banding dengan baik.
- c. Perusahaan memublikasikan dengan lengkap laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan tahunan tahun 2011.
- d. Data sampel yang diolah sudah mengeluarkan data *outlier*. Data yang dinyatakan sebagai data *outlier* adalah data yang berada di luar rentang nilai 3 kali standar deviasi di atas atau di bawah rata-rata.

Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh 326 perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder berupa laporan tahunan 2011 dan laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2011 yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan data yang bersumber dari Datastream dan Thomson Reuters Eikon.

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan uji regresi *multivariate* dengan model sebagai berikut. Penjelasan variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

$$\text{SCCOMPDISC}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{FAMOWN}_{it} + \beta_2 \text{MANOWN}_{it} + \beta_3 \text{KOMAUD}_{it} + \beta_4 \text{KA}_{it} + \beta_5 \text{SIZE}_{it} + \beta_6 \text{COMP_TA}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu SCCOMPDISC_{it} yaitu tingkat luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan perusahaan *i* pada tahun *t*. Luasnya pengungkapan diukur dengan menggunakan skor seperti pada penelitian yang sebelumnya

Tabel 1
Variabel Penelitian dan Ekspektasi Tanda Koefisien

Variabel	Nama Variabel	<i>Expected Sign</i>
Variabel Dependen		
Tingkat luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan	SCCOMPDISC	
Variabel Independen		
Kepemilikan manajerial	MANOWN	(+)
Kepemilikan keluarga bukan kelompok usaha	FAMOWN	(+)
Efektivitas komite audit	KOMAUD	(+)
Kualitas audit	KA	(+)
Variabel Kontrol		
Ukuran perusahaan	SIZE	(+)
Rasio total kompensasi manajemen kunci terhadap total aset perusahaan	COMP_TA	(+)

dilakukan oleh Farahmita (2012). Skor pengungkapan terbagi lima, yaitu:

1. Skor 0 diberikan apabila perusahaan tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan
2. Skor 1 diberikan apabila perusahaan hanya menyajikan total kompensasi tanpa keterangan kategori imbalan
3. Skor 2 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi masing-masing komisaris dan direktur
4. Skor 3 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi dengan memberikan deskripsi/kategori imbalan
5. Skor 4 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi dan memberikan rincian sub jumlah per kategori imbalan kerja.

Nilai skor pengungkapan tersebut dibagi dengan skor maksimal untuk menentukan nilai SCCOMPDISC sehingga nilai SCCOMPDISC bervariasi dari 0 hingga 1.

Variabel independen yang akan diteliti adalah:

- a. FAMOWN_{*it*} yaitu kepemilikan keluarga di perusahaan non-grup *i* pada tahun *t*. Pengukuran variabel kepemilikan keluarga ini mengikuti pengukuran oleh Arifin (2003) dan Siregar dan Utama

(2008) yang dipandang sesuai dengan karakteristik perusahaan di Indonesia. Apabila perusahaan dikontrol oleh keluarga (kepemilikan oleh keluarga lebih dari 50%) dan bukan merupakan bagian dari kelompok usaha, maka perusahaan memperoleh skor 1, dan 0 apabila sebaliknya. Kelompok usaha ditentukan berdasarkan apakah perusahaan berinvestasi di satu perusahaan atau lebih (Siregar dan Utama 2008). Jika perusahaan berinvestasi hanya di satu perusahaan, maka bukan termasuk kelompok usaha. Data ini dilihat dari jumlah anak perusahaan di laporan keuangan. Selain itu, juga dilihat apakah terdapat entitas sepengendali atas perusahaan tersebut. Jika terdapat entitas sepengendali, maka diklasifikasikan sebagai kelompok usaha.

- b. MANOWN_{*it*} yaitu kepemilikan manajerial perusahaan *i* pada tahun *t*. Mengacu ke hipotesis bahwa keberadaan kepemilikan manajerial pada perusahaan non-group memiliki pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang lebih luas di laporan keuangan, maka variabel ini menggunakan variabel *dummy*, yaitu apabila terdapat kepemilikan manajerial pada perusahaan non-grup maka memperoleh skor 1, dan 0 apabila sebaliknya. Kepemilikan manajerial yang dimaksud adalah saham yang dimiliki

baik oleh komisaris maupun oleh direktur di perusahaan yang tidak termasuk dalam kelompok usaha.

- c. $KOMAUD_{it}$ yaitu efektivitas komite audit perusahaan i pada tahun t . Variabel ini diukur dengan menggunakan *checklist* efektivitas komite audit (Lampiran 1) yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Pengukuran efektivitas ini dipandang sesuai karena mempertimbangkan beberapa aspek seperti pelaksanaan tugas komite audit, umur, latar belakang pendidikan, kehadiran dan jumlah rapat, serta jumlah anggota. *Checklist* menggunakan 11 indikator dengan skor 1 apabila termasuk pada nilai *poor*, skor 2 apabila bernilai *fair*, dan skor 3 apabila bernilai *good*. Skor atas 11 *checklist* pada masing-masing perusahaan akan ditotal dan dibagi dengan total skor maksimum.
- d. KA_{it} yaitu kualitas audit perusahaan i pada tahun t . Sesuai dengan DeAngelo (1981), kualitas audit dapat diukur dengan ukuran KAP. KA bernilai 1 apabila perusahaan diaudit oleh KAP *Big 4* dan bernilai 0 apabila tidak.

Selain variabel independen, penelitian ini juga akan menggunakan variabel kontrol untuk menentukan variabel independen, yakni $SIZE_{it}$ yaitu ukuran perusahaan perusahaan i pada tahun t yang diukur dengan logaritma natural total aset dan $COMP_TA_{it}$ yaitu rasio total kompensasi manajemen kunci dengan

total aset perusahaan i pada tahun t .

Teknik Analisis

Analisis data menggunakan diawali dengan pengujian statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan selanjutnya pengujian model penelitian dengan menggunakan estimasi OLS untuk regresi *multivariate*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel Terpilih dan Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan hasil pengukuran skor pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Dapat dilihat bahwa hanya 19,33% dari total perusahaan (63 perusahaan) pada penelitian ini yang sudah memenuhi kewajiban PSAK No. 7 (Revisi 2010) dengan mengungkapkan total kompensasi dan rincian sub jumlah per kategori imbalan kerja di laporan keuangan. Namun, juga terdapat perusahaan yang sama sekali belum mengungkapkan informasi kompensasi manajemen kunci, yaitu sebesar 5,83% (19 perusahaan). Hasil juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perusahaan yang mengungkapkan total kompensasi dengan kategori imbalan hanya untuk komisaris saja atau direktur saja, tetapi tidak mengungkapkan keduanya.

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 5,83% dari total perusahaan (19 perusahaan) pada penelitian ini yang tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan

Tabel 2
Tingkat Luasnya Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan Tahun 2011

Pengungkapan	Jumlah Perusahaan	%
Tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan	19	5,83%
Mengungkapkan total kompensasi keseluruhan	191	58,59%
Mengungkapkan total kompensasi masing-masing Komisaris dan Direksi	39	11,96%
Mengungkapkan total kompensasi dan kategori imbalan	14	4,29%
Mengungkapkan total kompensasi dan rincian sub jumlah per kategori imbalan kerja	63	19,33%
Total	326	100,00%

Tabel 3
Statistik Deskriptif Perusahaan yang Tidak Mengungkapkan
Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation	Variance	Freq
FAMOWN	19						2
MANOWN	19						7
KOMAUD	19	0,3333	0,8485	0,5598	0,1614	0,0260	
KA	19						1
SIZE (miliar)	19	7	50.000	3.380	11.840	140.100.000	

Keterangan: FAMOWN = kepemilikan keluarga, bernilai 1 apabila kepemilikan keluarga lebih dari 50% dan bukan bagian dari kelompok usaha, 0 apabila tidak; MANOWN = kepemilikan manajerial, bernilai 1 apabila terdapat kepemilikan manajerial dalam perusahaan, 0 apabila sebaliknya; KOMAUD = efektivitas komite audit; KA = kualitas audit, bernilai 1 untuk KAP *Big 4*, 0 apabila sebaliknya; SIZE = ukuran perusahaan

keuangan. Berikut statistik deskriptif atas perusahaan yang tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan:

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat kondisi perusahaan yang tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan, yaitu hanya sebagian kecil (2 perusahaan) dari perusahaan tersebut yang merupakan perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dan tidak termasuk kelompok usaha. Selain itu, hanya sebagian kecil perusahaan (7 perusahaan) yang sebagian sahamnya dimiliki oleh manajer. Dari sisi efektivitas komite audit,

nilai rata-rata 0,5598 menunjukkan efektivitas komite audit pada perusahaan tersebut secara rata-rata belum mencapai nilai *fair*. Selain itu, kualitas audit perusahaan yang diukur dengan ukuran KAP menunjukkan hanya 1 perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4*. Rata-rata perusahaan yang tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci memiliki total aset sebesar Rp11.840 miliar. Selanjutnya, dilakukan analisis statistik deskriptif atas seluruh variabel penelitian dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa rata-rata pengungkapan kompensasi

Tabel 4
Statistik Deskriptif Model Penelitian

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation	Variance	Freq.
SCCOMPDISC	326	0,00	1,00	0,4317	0,31277	0,098	
FAMOWN	326						27
MANOWN	326						157
KOMAUD	326	0,33	1,00	0,6540	0,16429	0,027	
KA	326						117
SIZE (jutaan)	326	7.340	1.520.000.000	5.563.000.000	13.353.500	1.783	
COMP_TA	326	0,00	0,09	0,0078	0,01216	0,000	

Keterangan: SCCOMPDISC = tingkat luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan; FAMOWN = kepemilikan keluarga, bernilai 1 apabila kepemilikan keluarga lebih dari 50% dan bukan bagian dari kelompok usaha, 0 apabila tidak; MANOWN = kepemilikan manajerial, bernilai 1 apabila terdapat kepemilikan manajerial dalam perusahaan, 0 apabila sebaliknya; KOMAUD = efektivitas komite audit; KA = kualitas audit, bernilai 1 untuk KAP *Big 4*, 0 apabila sebaliknya; SIZE = ukuran perusahaan; COMP_TA = rasio kompensasi manajemen kunci terhadap total aset

Tabel 5
Hasil Uji Signifikansi F dan Koefisien Determinasi

Uji Signifikansi F		Koefisien Determinasi	
F-statistic	17,90158	R-squared	= 25,18%
Prob(F-statistic)	0,000000	Adjusted R-square	= 23,78%

manajemen kunci di laporan keuangan sebesar 0,4317. Artinya, rata-rata perusahaan belum mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan dengan luas. Frekuensi kepemilikan keluarga berdasarkan Tabel 4 menunjukkan sebanyak 27 perusahaan pada penelitian ini dikendalikan oleh keluarga dan bukan merupakan bagian dari kelompok usaha. Frekuensi kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa pada 157 perusahaan yang menjadi objek penelitian ini terdapat kepemilikan manajerial. Nilai rata-rata efektivitas komite audit sebesar 0,654 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pada penelitian ini memiliki nilai *fair* atas hampir seluruh kriteria yang disebutkan pada *checklist* efektivitas komite audit yang artinya masih banyak perusahaan yang kemungkinan belum memenuhi seluruh kewajiban yang diatur oleh BEI dan Bapepam-LK. Frekuensi kualitas audit menunjukkan bahwa 177 perusahaan yang menjadi objek penelitian ini yang diaudit oleh KAP *Big 4*.

Sementara untuk variabel kontrol, rata-rata nilai ukuran perusahaan yang diukur

dengan total aset menunjukkan nilai yang cukup besar, yaitu Rp55.630 miliar dan rata-rata rasio kompensasi manajemen kunci terhadap total aset perusahaan adalah sebesar 0,0078.-

Analisis dan Pembahasan

Hipotesis diuji menggunakan model regresi *multivariate*. Metode estimasi yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, model mengandung masalah heteroskedastisitas yang kemudian sudah di-*treatment* menggunakan *White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance*.

Berdasarkan hasil regresi model penelitian pada Tabel 5, hasil uji signifikansi F menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 17,90%, signifikan. Ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel kontrol pada penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan variasi variabel dependen pada model penelitian. Selain itu, nilai *adjusted R-square* menunjukkan nilai 23,78%. Artinya, variabel independen dan variabel kontrol yang

Tabel 6
Hasil Regresi Model Penelitian

Variabel	Expected Sign	Actual Sign	Koefisien	t-Statistic	Prob.
FAMOWN	+	+	0,077826	1,532849	0,063150***
MANOWN	+	+	0,029940	0,981240	0,163600
KOMAUD	+	+	0,277853	2,893768	0,002050*
KA	+	+	0,245354	6,414682	0,000000*
SIZE			0,021416	1,912761	0,028350**
COMP_TA			2,020706	1,470342	0,071250***

Keterangan: SCCOMPDISC = tingkat luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan, bernilai 1 apabila diungkapkan, 0 apabila sebaliknya; FAMOWN = kepemilikan keluarga, bernilai 1 apabila kepemilikan keluarga lebih dari 50% dan bukan bagian dari grup usaha, 0 apabila tidak; MANOWN = kepemilikan manajerial, bernilai 1 apabila terdapat kepemilikan manajerial dalam perusahaan, 0 apabila sebaliknya; KOMAUD = efektivitas komite audit; KA = kualitas audit, bernilai 1 untuk KAP *Big 4*, 0 apabila sebaliknya; SIZE = ukuran perusahaan; COMP_TA = rasio kompensasi manajemen kunci terhadap total aset.

*, **, *** menotasikan tingkat signifikansi pada $\alpha = 1, 5, 10\%$

digunakan pada model penelitian ini dapat menjelaskan 23,78% variasi pada tingkat luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Sementara itu, 76,22% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil regresi model penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6 menunjukkan bahwa bahwa variabel kepemilikan keluarga perusahaan non-grup berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Artinya, perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dan tidak berada dalam grup usaha, memiliki pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Hasil ini mendukung hipotesis 1.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dan bukan merupakan bagian dari grup usaha dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas mengenai kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan daripada perusahaan yang tidak termasuk kategori tersebut. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Al-Akra dan Hutchinson (2012) dan Ali et al. (2007) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dapat memberikan pengungkapan yang lebih luas mengenai kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Selain itu, Tabel 6 juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh manajer dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh manajer. Hal ini ditunjukkan oleh level signifikansi hasil penelitian yang menunjukkan kepemilikan manajerial tidak signifikan baik pada tingkat 1%, 5% ataupun 10% sehingga hipotesis 2 tertolak. Hasil ini tidak konsisten dengan hasil hipotesis pertama yang menduga kepemilikan manajerial di perusahaan keluarga non-grup akan merepresentasikan perilaku kepemilikan keluarga non-grup yang memiliki pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang lebih luas. Hal ini mungkin disebabkan karena kepemilikan manajerial sangat rendah sehingga tidak mampu memberi pengaruh

signifikan terhadap pengungkapan di laporan keuangan.

Variabel lainnya yang diuji dalam penelitian ini yaitu efektivitas komite audit. Tabel 6 menunjukkan bahwa efektivitas komite audit memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat 1% terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Artinya, perusahaan yang memiliki komite audit yang bekerja dengan efektif dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas terkait pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan sehingga mendukung hipotesis 3. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Zhang et al. (2007) yang menyebutkan bahwa efektivitas komite audit dapat memengaruhi *internal control* perusahaan menjadi lebih baik. Lebih lanjut, penelitian ini juga mendukung penelitian Utama (2004), bahwa komite audit yang melaksanakan tugasnya dengan efektif dapat mendorong perusahaan untuk memberikan pengungkapan keuangan perusahaan dengan lebih baik.

Selain menguji pengaruh CG internal, penelitian ini juga telah menguji pengaruh CG eksternal terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan, yaitu kualitas audit. Kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat 1% terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Artinya, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4* dapat memberikan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big 4*, sehingga mendukung hipotesis 4. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Basset et al. (2007), DeAngelo (1981), Nielson dan Percy (2004), Farahmita (2012), dan Wang dan Chen (2004) bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP besar (*Big 4*) dapat mengungkapkan informasi yang bersifat wajib di laporan keuangan dengan lebih luas.

Variabel kontrol dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan, di

mana ukuran perusahaan signifikan pada $\alpha = 5\%$ dan rasio kompensasi manajemen kunci terhadap total aset pada $\alpha = 10\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan dapat mengungkapkan informasi kompensasi manajemen kunci dengan lebih luas pada laporan keuangan karena perusahaan besar lebih menjaga reputasinya dengan lebih transparan, mampu melaksanakan proses pengumpulan, klasifikasi, dan menyebarkan informasi kepada publik sehingga hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya seperti Omar dan Simon (2011), Agca dan Onder (2007), dan Alsaeed (2006). Temuan terkait rasio kompensasi manajemen kunci terhadap total aset juga mendukung penelitian sebelumnya oleh Farahmita (2012), Gao dan Kling (2012), dan Hermalin dan Weisbach (2008), yaitu semakin tinggi tingkat kompensasi manajemen kunci terhadap total aset, maka perusahaan dapat mengungkapkan informasinya dengan lebih luas dan beragam.

SIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran struktur CG yang memengaruhi pengungkapan wajib mengenai kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan berdasarkan PSAK No.7 (Revisi 2010) tentang Pihak-pihak Berelasi. Struktur CG yang diteliti adalah kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, efektivitas komite audit, dan kualitas audit terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi mewajibkan minimal pengungkapan di laporan keuangan berapa kompensasi manajemen dalam jumlah total per kategori imbalan kerja di laporan keuangan. PSAK ini baru mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011 sehingga ada kemungkinan terjadi variasi pada pengungkapan kompensasi manajemen kunci ini.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Total sampel final sebanyak 326 perusahaan. Data perusahaan yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data laporan keuangan dan laporan tahunan yang bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia. Selain itu, peneliti juga mengambil data dari Thomson Reuters Eikon dan Datastream. Pengujian hipotesis menggunakan data *cross section* dengan metode estimasi OLS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan masih bervariasi. Berdasarkan empat kategori pada penelitian ini, sebagian perusahaan hanya mengungkapkan kompensasi manajemen kunci pada tahun tersebut tanpa rincian jenis kompensasi. Bahkan, masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Hasil uji empiris menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, efektivitas komite audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Begitu juga dengan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan rasio kompensasi manajemen kunci terhadap total aset, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena hanya sedikit perusahaan yang manajemen kuncinya memiliki saham perusahaan (kurang dari 50 % dari sampel perusahaan).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan keluarga, efektivitas komite audit, dan kualitas audit secara positif signifikan memengaruhi luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Hal ini berimplikasi pada perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh keluarga dan bukan bagian

dari kelompok usaha menunjukkan struktur CG yang relatif lebih mampu mendorong manajemen untuk dapat memberikan informasi keuangan yang bersifat wajib di laporan keuangannya dalam rangka menjaga reputasi perusahaan. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi investor untuk melihat struktur kepemilikan keluarga dan kelompok usaha sebagai pertimbangan keputusan investasi. Selain itu, efektivitas komite audit juga dapat meningkatkan *internal control* perusahaan dan mendorong manajerial untuk memberikan informasi keuangan dengan lebih baik. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit sangat penting dalam praktik *internal control* dan penyajian informasi keuangan sehingga diharapkan perusahaan dapat selalu mengembangkan efektivitas komite audit melalui pemenuhan kriteria komite audit berdasarkan Peraturan BEI No. KEP-305/BEJ/07-2004 dan Peraturan Bapepam LK No. IX.I.5. Begitu pula dengan kualitas audit, yang diukur dengan proksi *Big 4* dan *non Big 4*, menunjukkan bahwa pemilihan auditor eksternal dapat mendorong struktur CG eksternal yang efektif sehingga dapat meningkatkan transparansi pengungkapan di laporan keuangan.

Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari adanya beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian-penelitian yang sejenis berikutnya dapat meminimalisasi keterbatasan-keterbatasan yang ada. Berikut beberapa keterbatasan penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Proksi kepemilikan manajerial di riset ini belum memisahkan antara kepemilikan yang dimiliki manajemen yang berasal dari pemegang saham pengendali dengan yang tidak berasal dari pemegang saham pengendali. Riset selanjutnya perlu membedakan hal tersebut karena manajemen yang tidak berasal dari pemegang saham pengendali akan memiliki perilaku yang berbeda dengan manajemen yang berasal dari pemegang saham pengendali.
2. Proksi kepemilikan manajerial menggunakan variabel *dummy* sehingga mungkin tidak merepresentasikan pengaruh kepemilikan manajerial. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan persentase kepemilikan manajerial pada perusahaan sehingga dapat lebih menunjukkan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan non keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data perusahaan keuangan agar dapat mengungkap faktor determinan pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan pada perusahaan keuangan sekaligus melihat konsistensi penelitian pada perusahaan keuangan.
4. Penelitian hanya menggunakan data satu tahun sehingga data tidak cukup beragam. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode observasi yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agca, A. and S. Onder. 2007. Voluntary Disclosure in Turkey: A Study on Firms Listed in Istanbul Stock Exchange (ISE). *Problems and Perspective in Management*, 5 (3), 241-286.
- Al-Akra, M. and P. Hutchinson. 2012. Family Firm Disclosure and Accounting Reform. *Research in Accounting Regulation*, 25 (1), 101-107.
- Ali, A., T. Y. Chen, and S. Radhakrishnan. 2007. Corporate Disclosures by Family Firms. *Journal of Accounting and Economics*, 44 (1-2), 238-286.
- Alseed, K. 2006. The Association between Firm-Specific Characteristics and Disclosure: The Case of Saudi Arabia. *Managerial Auditing Journal*, 21 (5), 476-496.
- Anderson, R. C. and D. M. Reeb. 2003. Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. *The Journal of Finance*, 58 (3), 1301-1328.

- Arifin, Z. 2003. *Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia*. Disertasi, Universitas Indonesia.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan. 2004. *Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan.
- Bassett, M., P. S. Koh, and I. Tutticci. 2007. The Association between Employee Stock Option Disclosures and Corporate Governance: Evidence from an Enhanced Disclosure Regime. *The British Accounting Review*, 39 (4), 303-322.
- Bhattacharya, U. and M. Spiegel. 1991. Insiders, Outsiders, and Market Breakdowns. *The Review of Financial Studies*, 4 (2), 255-282.
- Bursa Efek Indonesia. 2004. *Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat*. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- Claessens, S., S. Djankov, J. Fan, and L. Lang. 1999. *Expropriation of Minority Shareholders in East Asia*. Working Paper, The World Bank.
- Claessens, S., S. Djankov, and L. H. Lang. 2000. The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics*, 58 (1), 81-112.
- Conyon, M. J. and L. He. 2011. Executive Compensation and Corporate Governance in China. *Journal of Corporate Finance*, 17 (4), 1158-1175.
- Darus, F., R. Arshad, S. Othman, and K. Jusoff. 2009. Influence of Institutional Pressure and Ownership Structure on Corporate Social Responsibility Disclosure. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, 1 (5), 123-150.
- DeAngelo, L. E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3 (3), 183-199.
- Faccio, M., L. Lang, and L. Young. 2001. Dividends and Expropriation. *American Economic Review*, 91 (1), 54-78.
- Farahmita, A. 2012. *Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan: Studi atas Revisi PSAK No. 7 (2010)*. Working Paper, Universitas Indonesia.
- Gao, L. and G. Kling. 2012. The Impact of Corporate Governance and External Audit on Compliance to Mandatory Disclosure Requirements in China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 21 (1), 17-31.
- Hermalin, B. E. and M. S. Weisbach. 2012. Information Disclosure and Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 67 (1), 195-233.
- Hermawan, A. A. 2009. *Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan Peran Monitoring Bank terhadap Kandungan Informasi Laba*. Disertasi, Universitas Indonesia.
- Ho, S. S. and K. S. Wong. 2001. A Study of the Relationship between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 10 (2), 139-156.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305-360.
- Lo, A. W. and R. M. Wong. 2011. An Empirical Study of Voluntary Transfer Pricing Disclosures in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30 (6), 607-628.
- Morck, R. and B. Yeung. 2003. Agency Problems in Large Family Business Groups. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 27 (4), 367-382.

- Nelson, J. and M. Percy. 2004. *The Quality of Executive Stock Options Disclosures in Australian Annual Reports*. Working Paper, Queensland University of Technology.
- Omar, B. and J. Simon. 2011. Corporate Agregate Disclosure Practices in Jordan. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 27 (1), 166-186.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Siregar, S. V. dan S. Utama. 2008. Type of Earnings Management and The Effect of Ownership Structure, Firm Size, and Corporate Governance Practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 43 (1), 1-27.
- Utama, M. 2004. Komite Audit, Good Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (1), 61-79.
- Wang, Y. Y. and H. W. Chen. 2004. Auditing Quality and Accounting Information Transparency Evidences from Chinese Listed Corporations. *Accounting Research*, 4, 9-15.
- Wang, D. 2006. Founding Family Ownership and Earnings Quality. *Journal of Accounting Research*, 44 (3), 619-656.
- Zhang, Y., J. Zhou, and N. Zhou. 2007. Audit Committee Quality, Auditor Independence, and Internal Control Weaknesses. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26 (3), 300-327.

LAMPIRAN

Daftar Checklist Efektivitas Komite Audit (Hermawan 2009)

No	Description	Good	Fair	Poor
1-5	Asses the responsibilities fulfilled by the audit committee during the year, include the following items: 1. Evaluating internal control 2. Propose auditor 3. Financial report review 4. Evaluating legal compliance 5. Prepare a complete audit committee report for disclosure <i>In each category, if responsibility is fulfilled, firms will receive a 'good' score. If the responsibility is not fulfilled or no information, the company will receive a 'poor' score.</i> Sumber: IICD (2005)			
6	How many meetings were held during the year? <i>If the audit committee meets more than six times, the firm will earn a 'good' score. If 4-6 meeting, the firm will earn a 'fair' score, while less than four times or no information will be scored as 'poor.'</i> Sumber: IICD (2005)			
7	What is attendance performance of the audit committee members during the year? <i>If the overall audit committee attendance or the year is greater than 80%, the firm earns a 'good' score. If attendance is 70%-80% receives a 'fair' score, and less than 70% or no information receives a 'poor' score.</i> Sumber: IICD (2005)			
8	Does the audit committee evaluate the scope, accuracy, and cost effectiveness, independency and objectivity of external auditor? <i>If the audit committee evaluates all of the items, the firm has a 'good' score. If only some part of the items was evaluated, the score will be 'fair' and if none of the items was evaluated, the score will be 'poor.'</i> Sumber: Lampiran Kep-339/BEJ/07-2001			
9	What is the size of the audit committee? <i>If there are 3 person in the audit committee the score will be 'fair,' and if there is more than 3 person in the audit committee, the score will be 'good.' If there is no information, the score will be 'poor.'</i> Sumber: Lampiran Kep-339/BEJ/07-2001			

10	<p>Does the audit committee have an accounting background? <i>If the company has more than 1 person with accounting background, the firm will earn a 'good' score. If the company has only 1 person with accounting background, the firm will earn a 'fair' score, and if none has accounting background or no information, the score will be 'poor.'</i></p> <p>Sumber: Dwaliwal et al. (2007)</p>			
11	<p>What is the average age of the audit committee? <i>If the average age of the audit committee is more than 40 years old, the company will received a 'good' score. If the average age of the audit committee is between 30 and 40 years old, the score is 'fair' and if the average age is below 30 years old, the score will be 'poor.'</i></p> <p>Sumber: Anderson et al (2004)</p>			
	TOTAL			